

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM SUMEDANG

Ari Prayoga

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ariprayoga.spd@gmail.com

Arif Risnandi

Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: risnandiarif6@gmail.com

ABSTRACT

Financing management in the Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang has obstacles in the administrative reporting of monthly financing. There are a number of cases of students whose financial report books have not been recorded in the treasurer's large book. This study aims to reveal the management of financing including; planning, analysis, strategy and evaluation of funding for education in the Sumedang Madrasah Aliyah Darussalam. The research method used is qualitative. The collection technique uses structured interview techniques, participatory observation techniques and documentation techniques. The results of the study show that; First, the financial planning process is carried out by formulating the data format for filing budget proposals from the madrasa education section of Sumedang district. Second, financing analysis is carried out by the head of the madrasa and vice principal of the madrasa in meeting the needs of the institution, this is discussed in the meeting. Third, system development and management of accountable costs, madrasas carry out procedures for the procurement of goods and services in the scope of madrasa needs of facilities and infrastructure, management operations are carried out by the treasurer in regulating expenditure and income financing from students. Fourth, the evaluation is carried out by the madrasa involving the madrasah civitas, the madrasa treasurer as the technical executor and the head of the madrasa as the holder of the cost management policy decision.

Keywords: *Management, financing, madrasa.*

ABSTRAK

Pengelolaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus peserta didik yang buku laporan pembiayaannya belum tercatat di buku besar bendahara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengelolaan pembiayaan meliputi; perencanaan, analisis, strategi dan evaluasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara terstruktur, teknik observasi partisipatif dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, proses perencanaan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah

kabupaten Sumedang. *Kedua*, analisis pembiayaan dilakukan kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan kebutuhan lembaga, hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat. *Ketiga*, pengembangan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel*, madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. *Keempat*, Evaluasi dilakukan oleh madrasah melibatkan sivitas madrasah, bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan biaya.

Kata Kunci: *Manajemen, pembiayaan, madrasah.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam mutu pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan kadang juga merupakan inti dari setiap permasalahan pendidikan, apalagi jika dihubungkan dengan Pembiayaan pendidikan pada swasta yang seluruhnya bersumber dari dana masyarakat walaupun sebenarnya ada bantuan dari pemerintah tetapi tidak terlalu signifikan untuk dibuat acuan dalam penentuan kebijakan maka kualitas pendidikan tinggi swasta tentu sangat bergantung pada bagaimana manajemen pembiayaannya. Manajemen Pembiayaan yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan sebuah lembaga pendidikan untuk memajukan atau meningkatkan kualitasnya¹.

Pendidikan dikatakan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memberi bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar dapat berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon tenaga kerja. Pendidikan dipandang sebagai sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dan membentuk karakter bangsa².

¹Achmad Anwar Abidin, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', Jurnal Penjaminan Mutu, 3.1 (2017), 88.

²Rizka Nur Rachma Dewi, 'Analisis Investasi Sumber Daya Manusia Di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2005-2009)', Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi, 6.2 (2017), 97.

Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang berlokasi di lingkungan Jalan Serma Muchtar Baru Nomor01 Kelurahan Situ Panyingkiran Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Secara geografis MA Darussalam Sumedang berlokasi di daerah perkotaan. Jarak ke kantor Kementerian Agama Kab. Sumedang sekitar 2 km, Jarak ke kantor kemendikbud sekitar 3 km. Akses dari pusat pemerintahan, rumah sakit, perguruan tinggi dan fasilitas umum pasar ke lokasi dapat dilalui kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Lokasi berdekatan dengan, usaha home industri, kerajinan, perdagangan dan Usaha Kecil Menengah lainnya serta perumahan padat penduduk yang religius.

Pengelolaan pembiayaan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang memiliki kendala dalam pelaporan secara administratif pembiayaan bulanan. Ada beberapa kasus peserta didik yang buku laporan pembiayaannya belum tercatat di buku besar bendahara. Pembayaran yang tidak langsung dicatat secara administratif oleh bendahara. Pelaporan yang tidak ditangani oleh bendahara dan ditangani secara administratif oleh kepala TU. Pembayaran administrasi keuangan yang masih banyak belum lunas dari beberapa peserta didik di tingkatan kelas. *Auditing* akhir yang tidak rutin dilakukan yaitu secara seremonial ketika akhir bulan saja, tidak dicatat setiap Minggu. Strategi pengelolaan biaya pendidikan dilakukan secara langsung dan dirumuskan oleh kepala madrasah bersama pimpinan yayasan Darussalam Sumedang³.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama,

³Sarah Sahrani, *Wawancara Bendahara Umum Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2019).

yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan⁴.

Selama ini dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah relatif sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana APBN dalam bidang pendidikan menjadi kendala besar dalam penyelenggaraan pendidikan Nasional yang berkualitas, termasuk pendidikan Madrasah Swasta. Hal ini sejalan dengan pernyataan Zubaidi: "Dari sekian permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam diantaranya adalah masalah kekurangan dana dan minimnya fasilitas pendidikan", oleh sebab itu masalah biaya pendidikan seharusnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi perlu adanya optimalisasi pembiayaan pendidikan yang bersumber pada lingkungan pendidikan melalui pemberdayaan peran serta masyarakat di dalamnya. Sebagaimana tertuang dalam pedoman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 9 bahwa: Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan⁵.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka perlu ada kajian lebih lanjut terkait perencanaan, analisis kesenjangan, penyusunan strategi pengelolaan dan evaluasi biaya pendidikan dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang.

⁴Ferdi W. P, 'Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19.4 (2013), 567.

⁵Sonedi Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri Majeri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat', *Jurnal Fenomena*, 9.1 (2017), 26.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kamus Webster disebutkan bahwa pengelolaan/manajemen berasal dari kata *manage* (*maneggio, Italia*), berarti mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis, yaitu *manège* yang berarti kepemilikan kuda (dan dalam bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda). Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur⁶. Pengelolaan atau manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Dengan demikian, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan⁷.

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi⁸.

Telah diketahui bahwa peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dilakukan dalam tempo yang singkat, namun memerlukan waktu yang panjang. Investasi modal manusia sebenarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan *rate of return* (manfaatnya) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan investasi, maka ia

⁶A. Rusdiana, *Kewirausahaan: Teori Dan Praktik*, Edisi 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 178.

⁷A. Rusdiana, *Manajemen Operasi*, ed. by Beni Ahmad Saebani, Edisi 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 17.

⁸Hastarini Dwi Atmanti, 'Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan', *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2.1 (2005), 36.

harus melakukan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*). Biayanya adalah berupa biaya yang dikeluarkan untuk bersekolah dan *opportunity cost* dari bersekolah adalah penghasilan yang diterimanya bila ia tidak bersekolah. Sedangkan manfaatnya adalah penghasilan (*return*) yang akan diterima di masa depan setelah masa sekolah selesai. Diharapkan dari investasi ini manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada biayanya⁹.

Suwardan menyatakan bahwa apabila seseorang menginvestasikan biaya kesempatan (uang, waktu dan tenaga) yang dimiliki untuk pendidikan, dia akan memperoleh manfaat, baik bagi dirinya dan lingkungan sekitar (sosial). Manfaat tersebut antara lain; a.manfaat individu dan sosial; b.manfaat jangka pendek dan panjang; c.manfaat terhadap antar generasi; dan mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan dalam melakukan kerjasama dan persaingan. Manfaat individu mempermudah manusia dalam melakukan kerjasama dan persaingan¹⁰.

Dalam dunia pendidikan terdapat pengelolaan pembiayaan pendidikan karena pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sebuah lembaga pendidikan di masa sekarang yang dalam hal ini pemerintah juga mengaturnya dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan¹¹. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pada pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 3 (1) Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan¹².

⁹Hastarini Dwi Atmanti, 'Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan', *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2.1 (2005), 32.

¹⁰Arina Hidayati, 'Perencanaan Karir Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Siswa SMK (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25.2 (2015), 3.

¹¹Achmad Anwar Abidin, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', 88.

¹²Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan* (Jakarta, 2008), pp. 1-57.

Adapun besarnya biaya pendidikan yang dibebankan pada pemerintah sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen adalah sebesar 20% dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara pada masa tahun anggaran berjalan dan kebijakan 20% ini tidak dalam lingkup nasional semata tetapi juga dari anggaran APBD untuk propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah sesuai PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan¹³. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah¹⁴.

Menurut Maretsya Soegiarto dan Heriyanto strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi pembiayaan meliputi strategi perencanaan (pelaksanaan gagasan), pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan pada lembaga formal, diawali dengan disusunnya Visi dan Misi Sekolah, strategi perencanaan dan penyusunan RAPBS dilaksanakan melalui analisis SWOT sederhana. Strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan¹⁵.

¹³Achmad Anwar Abidin, *'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)'*, 89.

¹⁴Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Jakarta, 2009), pp. 1-13.

¹⁵Ririn Margareta and Ismanto Bambang, 'Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di SMP Negeri', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4.2 (2017), 197.

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Dalam hal ini, kemampuan pengelola pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi menjadi faktor penting. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program¹⁶. Anggaran biaya selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan¹⁷.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif, pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya, metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya¹⁸. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹⁹. Studi pustaka dilakukan dengan

¹⁶Ririn Margareta and Ismanto Bambang, 'Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di SMP Negeri', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4.2 (2017), 198.

¹⁷Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan* (Jakarta, 2008), 10.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 14

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 24th edn (Bandung: Alfabeta, 2016), 9

cara meneliti dokumen atau buku-buku serta teks lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang seperti buku besar, buku administrasi pembayaran siswa, buku rekening madrasah, Surat-surat kelengkapan sarana prasarana madrasah dll. Studi lapangan dengan cara mengamati pelaku pendidikan, fenomena, keberadaan dan pengelolaan pembiayaan pendidikan, sehingga dapat terdeskripsikan secara menyeluruh yaitu dengan ikut dalam kegiatan proses pencatatan administrasi pembiayaan, pengelolaan aset madrasah, pengadministrasian aset pembiayaan madrasah dsb. *informan* dalam penelitian ini meliputi: Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang, bendahara madrasah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembiayaan Madrasah

Proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Langkah ini dilakukan oleh kepala madrasah bersama dengan bendahara umum madrasah sebagai proses awal memunculkan kalkulasi angka besaran kebutuhan pembiayaan madrasah²⁰. Dalam strategi pembiayaan, kegiatan penentuan kebutuhan pembiayaan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh madrasah. Keputusan itu menyangkut pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan pembiayaan dibuat dalam sebuah kerangka perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi dalam konteks kebijakan madrasah sebagai acuan prioritas alokasi pembiayaan madrasah²¹.

Bendahara umum akan melaporkan pengajuan dan analisis data untuk pemenuhan pembiayaan meliputi sarana dan prasarana yaitu rehabilitasi gedung rusak, pembelian alat elektronik, barang habis pakai, anggaran belanja pegawai,

²⁰Sarah Sahriani, *Laporan Penyusunan Perencanaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018), 11.

²¹A. Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, II (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 145.

perpajakan madrasah dll²². Perencanaan pembiayaan dalam A. Rusdiana meliputi penilaian terhadap pembiayaan yang telah ada dan perencanaan pengadaan dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan pelayanan²³. Strategi yang diambil oleh lembaga khususnya bendahara umum madrasah didasarkan pada analisis kebutuhan bersama seluruh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang lainnya sehingga menghasilkan alternatif dan pilihan yang dapat diambil dan disahkan dalam kebijakan madrasah.

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA BPMU PROVINSI
TAHUN PELAJARAN : 2018/2019- 2019/2020**

| No. Kode | Belanja/Anggaran | Volume/Uraian | Rencana Biaya | Keterangan |
|------------|---|-------------------------------|---------------|--------------|
| A | Belanja Operasi Personalia | | | |
| A.1 | Honorarium Tenaga Pendidik Honoror : | | | |
| A.1.1 | Honor mengajar | 12 bulan x 233 JP x Rp 11.500 | Rp2.679.500 | Rp32.154.000 |
| A.1.2 | Honor Wali Kelas | 12 bulan x 6 orang | Rp50.000 | Rp3.600.000 |
| A.1.3 | Honor Kepala Laboratorium | 12 bulan x 2 orang | Rp70.000 | Rp1.680.000 |
| A.1.4 | Honor Kepala Perpustakaan | 12 bulan x 1 orang | Rp70.000 | Rp840.000 |
| A.1.5 | Honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka | 12 bulan x 1 orang | Rp30.000 | Rp360.000 |
| A.1.6 | Honor Pembina Ekstrakurikuler Volly | 12 bulan x 1 orang | Rp30.000 | Rp360.000 |
| A.1.7 | Honor Pembina Ekstrakurikuler Futsal | 12 bulan x 1 orang | Rp30.000 | Rp360.000 |
| A.1.8 | Honor Pembina Ekstrakurikuler Seni Qiroat | 12 bulan x 1 orang | Rp30.000 | Rp360.000 |
| B | Belanja Operasi Non Personalia | | | |
| B.1 | 1. Biaya Pelaporan dan operasional non personalia | | | Rp286.000 |

²²Sahrhani, *Laporan Penyusunan Perencanaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang*, 11.

²³Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 145.

| | | |
|-------------|--|--------------|
| Jumlah (Rp) | | Rp40.000.000 |
|-------------|--|--------------|

2. Analisis Pembiayaan Madrasah

Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran pembiayaan madrasah. Bendahara akan memberikan gambaran alokasi biaya untuk mengefektifkan penggunaan alokasi anggaran pada ranah sarana dan prasarana, anggaran belanja pegawai dll. Jika alokasi pembiayaan yang ada masih mampu dalam mendukung alokasi biaya maka akan ada kebijakan dalam melanjutkan kebijakan perencanaan sebelumnya. Jika alokasi berlebihan maka akan ada pengurangan anggaran sehingga tidak terjadi surplus dalam anggaran pembiayaan madrasah²⁴.

Dalam buku A.Rusdiana mengemukakan teori yang sama dengan mekanisme yang berbeda yaitu proses analisis ini membandingkan antara pembiayaan yang dibutuhkan dengan biaya yang sedang digunakan dalam kegiatan pelayanan. Yang diidentifikasi diantaranya yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan layanan, pembiayaan yang ada, pembiayaan yang berlebih untuk penyediaan pelayanan, pembiayaan yang harus di hapuskan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan di sekolah²⁵.

3. Strategi Pembiayaan Madrasah

Untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel* madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan biaya dari peserta didik, pemeliharaan biaya sarana dan prasarana dilakukan dalam

²⁴Bendahara Madrasah, *Laporan Hasil Rapat Penyusunan Anggaran Madrasah TA. 2018/2019* (Sumedang, 2018), 13.

²⁵Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 146.

kurun waktu satu kali dalam satu semester sehingga memperkecil kemungkinan kerusakan dan penghapusan dari sarana prasarana tersendiri dan penghapusan yang sifatnya sudah tidak dapat di perbaiki²⁶.

Suatu pendekatan terintegrasi terhadap perencanaan dan manajemen pembiayaan memungkinkan entitas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efisien. Strategi pengelolaan pembiayaan akan menentukan wewenang dan tanggung jawab untuk tindakan sehubungan dengan kegiatan pengelolaan pembiayaan madrasah. Strategi pengelolaan pembiayaan infrastruktur dan lahan dengan mengidentifikasi dan menanggapi sejumlah komponen lembaga internal dan eksternal yang dihadapi manajemen. Strategi pengelolaan strategi manajemen meliputi; berasal dari kebijakan, konsisten dengan kebijakan lembaga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan *stake holder* madrasah. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber- sumber pendapat pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya.²⁷.

4. Evaluasi Pembiayaan Madrasah

Evaluasi dilakukan oleh madrasah melibatkan sivitas madrasah baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan pembiayaan. Bentuk laporan pembiayaan dituangkan dalam pelaporan BPMU untuk kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. Rapat internal evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan pada akhir semester di madrasah dengan mekanisme pelaporan dari bendahara baik secara teknis laporan buku besar yang meliputi, pemasukan, pengelolaan, pembayaran, pengeluaran

²⁶Sahrani, *Wawancara Bendahara Umum Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang*.

²⁷Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 142.

pembiayaan madrasah. Pelaksanaan dilakukan secara musyawarah dan menghasilkan laporan pembiayaan yang sudah siap di sampaikan ke yayasan²⁸.

Evaluasi atas pembiayaan yang telah ada dilakukan untuk menentukan apakah kinerja pembiayaan tersebut memadai untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan mencakup evaluasi atas kinerja pembiayaan. Kinerja pembiayaan ditinjau ulang/*review* secara rutin dengan perbandingan praktek terbaik untuk mengidentifikasi pembiayaan yang kinerjanya buruk yang membutuhkan biaya terlalu tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan²⁹.

E. SIMPULAN

Pertama, proses perencanaan kebutuhan pembiayaan dilakukan dengan menyusun format data isian pengajuan anggaran dari seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang. *Kedua*, Ketika rapat penyusunan anggaran berlangsung maka akan ada analisis dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dalam pemenuhan administrasi dan pembiayaan. Hal tersebut dimusyawarahkan dalam rapat agar tercipta alternatif dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan anggaran biaya madrasah. *Ketiga*, Untuk mengembangkan sistem dan pengelolaan biaya yang *akuntabel* madrasah melakukan prosedur rencana pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup kebutuhan madrasah dari sarana dan prasarana, operasi pengelolaan dilakukan oleh bendahara dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan pembiayaan dari peserta didik. *Keempat*, Evaluasi dilakukan oleh madrasah melibatkan sivitas madrasah baik bendahara madrasah selaku pelaksana teknis dan juga kepala madrasah sebagai pemegang keputusan kebijakan pengelolaan biaya. Bentuk laporan pembiayaan dituangkan dalam pelaporan BPMU untuk kemudian dilaporkan kepada seksi pendidikan madrasah kabupaten Sumedang.

²⁸Bendahara Madrasah, *Laporan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018), 13.

²⁹Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 145.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3 (2017), 87–99
<<https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>>
- Dewi, Rizka Nur Rachma, 'Analisis Investasi Sumber Daya Manusia Di Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2005-2009)', *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6 (2017), 96–106
<<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ekonomi/article/view/6083>>
- Dwi Atmanti, Hastarini, 'Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan', *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2 (2005), 30–39
<<http://eprints.undip.ac.id/16864>>
- Hidayati, Arina, 'Perencanaan Karir Sebagai Bentuk Investasi Pendidikan Siswa SMK (Studi Kasus Di SMK Negeri 1 Batang)', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25 (2015), 1–10
<<http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/1531>>
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Lisnawati, Cucu, 'Aspek Ekonomi Dalam Pendidikan', *Jurnal Educare*, 4 (2007), 73–82 <<http://jurnal.fkip.unla.ac.id/index.php/educare/article/view/50>>
- Madrasah, Bendahara, *Laporan Evaluasi Pengelolaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018)
- Madrasah, Bendahara, *Laporan Hasil Rapat Penyusunan Anggaran Madrasah TA. 2018/2019* (Sumedang, 2018)
- Margareta, Ririn, and Ismanto Bambang, 'Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Di SMP Negeri', *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4 (2017), 195–204
<<https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p195-204>>

- Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* (Jakarta, 2009), pp. 1–13
- Milles, Matthew B & Huberman, Michael A., *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992)
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan* (Jakarta, 2008), pp. 1–57
- Rusdiana, A., *Kewirausahaan: Teori Dan Praktik*, Edisi 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)
- Rusdiana, A., *Manajemen Operasi*, ed. by Beni Ahmad Saebani, Edisi 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)
- Rusdiana, A., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, II (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)
- Sahrhani, Sarah, *Laporan Penyusunan Perencanaan Anggaran Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2018)
- Sahrhani, Sarah, *Wawancara Bendahara Umum Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang* (Sumedang, 2019)
- Sonedi, Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri Majeri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat', *Jurnal Fenomena*, 9 (2017), 25
<<https://doi.org/10.21093/fj.v9i1.702>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 24th edn (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- W. P, Ferdi, 'Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19 (2013), 565–78
<<https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>>